

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan sebuah distrik federal.¹ Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari empat puluh delapan negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington D.C.. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, dan Meksiko di sebelah selatan. Dua negara bagian lainnya yaitu Alaska dan Hawaii, terletak terpisah dari dataran utama Amerika Serikat. Negara bagian Alaska terletak di sebelah ujung barat laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di sebelah timur dan Rusia di sebelah barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering. Sedangkan negara bagian Hawaii adalah sebuah kepulauan yang berlokasi di Samudra Pasifik. Dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi (9,83 juta km²) dan jumlah penduduk sebanyak 315 juta jiwa, Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk.

Pasaran energi Amerika Serikat adalah 29.000 jam-terawatt per tahun dan konsumsi energi per kapita adalah 7,8 ton kesetaraan minyak per tahun. Pada 2005, 40% energi ini berasal dari minyak bumi, 23% dari batu bara, dan 22% dari gas alam. Sisanya dipasok oleh tenaga nuklir dan sumber energi terbarukan lainnya.² Dari data tersebut terlihat bahwa sumber energi utama Amerika Serikat

¹ CIA. *The World Factbook*. United States. September 30, 2009.

² Energy Information Administration. "Diagram 1: Energy Flow, 2007". *EIA Annual Energy Review 2007*. U.S. Dept. of Energy.

adalah minyak bumi, bahkan Amerika Serikat tercatat sebagai konsumen minyak bumi terbesar di dunia.³ Jadi, tidak heran apabila Amerika Serikat memusatkan perhatiannya secara intensif terhadap kawasan Timur Tengah.

Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis, dan budaya merupakan bagian dari benua Asia, atau Afrika-Eurasia. Selain merupakan tempat kelahiran, dan pusat spiritual agama Islam, Kristen, dan Yahudi, Timur Tengah juga mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar. Salah satu negara di Timur Tengah yang mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar adalah Irak. Diperkirakan kapasitas kandungan minyak Irak sebesar 112 miliar barel yang berarti menempati urutan kedua setelah Arab Saudi.⁴ Kualitas minyak bumi Irak pun juga terkenal sangat baik. Hal inilah yang membuat politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak mempunyai porsi dan perhatian yang cukup besar.

Pada tahun 2004, setahun setelah invasi Amerika Serikat di Irak, seorang warga Yordania, Abu Muzab Az-Zarqawi mendirikan sebuah kelompok beraliran *salafi* yang bernama *Jama'ah Tauhid & Jihad* (JTJ). Kelompok inilah yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Secara bahasa, kata '*salaf*' berarti yang sudah lalu, namun kata

³ Fitriana Monica Sari. 2016. *5 Negara Konsumen Minyak Terbesar di Dunia*. <http://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/5-negara-konsumen-minyak-terbesar-di-dunia/ar-BBxHPBt?li=AA59Az>.
Diakses pada 16 Maret 2017, 16.12 WIB.

⁴ Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa Publishing House, 2014. hal. 18.

'*salaf*' atau *salafiyah* digunakan untuk menunjuk generasi perintis umat Islam.⁵

Zarqawi membangun kelompok ini menjadi sebuah pasukan mobilisasi yang dikenal dengan nama Jundusy Syam (tentara syam). Zarqawi merekrut masyarakat Islam terbuang yang berasal dari Yordania, Palestina, dan Suriah yang berada di Eropa. Pada tahun 2001, populasi di *camp* Herat sudah mencapai dua ribu sampai tiga ribu orang, sehingga menjadikan Zarqawi sebagai pemimpin penuh kelompok teroris di Herat.⁶

Pada Oktober 2004, JTJ secara resmi berbaiat kepada Al-Qaeda. Berbaiat merupakan perjanjian untuk memberi ketaatan dan membuat janji setia. Dengan adanya hal tersebut, maka JTJ berubah menjadi Tanzim Qadatfi Al-Jihad fi Bilad Al-Rafidayn, yang berarti Al-Qaeda di negeri dua sungai, karena negara Irak dibelah oleh dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Eufrat. Akan tetapi, di kalangan internasional kelompok ini dikenal sebagai Al-Qaeda in Iraq (AQI).

Sepanjang tahun 2005, kegiatan AQI semakin meningkat dan bertambah ganas. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya bom bunuh diri, pembunuhan, dan pemenggalan. Pada bulan Januari 2006, Al-Qaeda memerintahkan AQI serta kelima grup yang berafiliasi dengan Al-Qaeda agar bersatu, di mana kelima grup tersebut adalah Jaish At-Taifha Al-Mansoura, Katbiyan Ansar At-Tawhid was-Sunnah, Faksi Saray Al-Jihad, Brigade Al-Ghuraba, dan Al-Ahwal Brigade.

⁵ Fernando Tambunan. *Sejarah dan Ideologi ISIS*. Jakarta. 2014. hal 8

⁶ *Ibid*. Hal 2

Keseluruhan kelompok ini bersatu dan menjadi *Mujahideen Shura Council* (MSC) atau majelis syura. MSC merupakan organisasi payung yang bertujuan untuk mempersatukan semua kelompok sunni di Irak, dan MSC menyatakan menghapus kelompok-kelompok jihad termasuk AQI, serta mengangkat Zarqawi sebagai pemimpin kelompok ini.

Pada 2006, Zarqawi meninggal dunia di daerah hibib akibat serangan udara Amerika Serikat. Dengan meninggalnya Zarqawi, MSC dan seluruh kelompok yang beraliansi dengan MSC memproklamkan berdirinya *Islamic State of Iraq* (ISI) dengan mengangkat Abu Umar Al-Quraisy Al-Husaini Al-Baghdadi sebagai pemimpin.⁷

Abu Umar Al-Baghdadi, merupakan mantan anggota pasukan keamanan Irak yang dipecat karena sifat ekstremismenya. ISI memiliki pemikiran yang lebih maju dibandingkan JTJ dan AQI. Hal ini karena ISI memiliki rancangan kabinet dan konstitusi. ISI yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Irak dan menggantinya dengan negara Islam murni, menempatkan fokus yang lebih besar kepada masa depan perang, kelompok, dan Irak. Hal ini berbeda dengan Zarqawi, karena ia lebih berfokus kepada konsolidasi kekuasaan dan mengalahkan musuh secara langsung.⁸

Di bidang militer, ISI masih menggunakan taktik yang dulu kerap digunakan oleh AQI, salah satunya taktik meledakkan bom di kawasan padat penduduk. Taktik yang lantas membuat ISI dimusuhi oleh orang-orang Irak. Sehingga, pada awal tahun 2007, ISI mulai terlibat konflik dengan milisi-milisi yang tidak sejalan dengan mereka. Namun, tidak lama memimpin organisasi tersebut Abu

⁷ *Ibid.* Hal 3

⁸ *Ibid.* Hal 4

Umar Al-Baghdadi tewas dalam serangan gabungan antara pasukan Irak dan Amerika Serikat. Kemudian, Majelis Syura memilih Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpin Tanzhimu Ad-Daulah Al-Islamiyah fi Al-Iraq.

Masuknya ISI ke Suriah ditandai dengan keluarnya pernyataan dari Abu Bakar Al-Baghdadi pada bulan April 2013, yang menyatakan bahwa jika ISI melebur dengan Jabhat An-Nusra (JN) yang berada di Suriah untuk membentuk Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Jabhat An-Nusra sendiri merupakan kelompok pemberontak Suriah yang berideologi Islam dan banyak beranggotakan veteran konflik Irak. Pada awalnya, Jabhat An-Nusra tidak keberatan.

Namun, kontroversi timbul karena tidak lama keluarnya pernyataan Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Muhammad Al-Jaulani, pemimpin Jabhat An-Nusra memberi pernyataan jika kelompoknya tidak bersedia melebur dengan ISIS. Menurut Nathaniel Rosenblatt, ada dua alasan mengapa JN berpisah dengan ISIS, pertama, karena JN tidak mendukung negara Islam di seluruh wilayah, tetapi hanya fokus kepada Suriah. Kedua, meskipun keduanya percaya pada negara Islam, JN tidak memaksakan agenda mereka. Jika ISIS secara eksplisit melarang rokok di desa-desa, JN hanya menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak tepat. Maka, sejak saat itu terjadi perpecahan internal di Jabhat An-Nusra, antara pengikut setia Abu Bakar Al-Baghdadi dan pengikut Al-Jaulani.⁹ Sejak perpecahan itu, ISIS melakukan teror sendiri ke Suriah. Mereka menjadikan Raqqa sebagai basis komando dan kekuatan mereka di Suriah.¹⁰

⁹ *Ibid.* Hal. 5

¹⁰ Kiram Ikhwanul Mashuri. *ISIS: Jihad atau Petualangan*. Jakarta: Republika. 2014. Hal 11

Tidak hanya dari Jabhat An-Nusra, Al-Qaeda memutuskan hubungan dengan ISIS dan menolak adanya ISIS. Pemimpin Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri mengatakan, tidak terlibat lagi dengan kelompok pemberontak jihad paling agresif di Irak dan Suriah. Zawahiri menilai ISIS sebagai kelompok pembangkang yang merusak citra Al-Qaeda lewat bom mobil, pembunuhan massal, dan penyiksaan sesama muslim.

Jabhat An-Nusra merupakan salah satu kelompok jihadis yang ada di Suriah. Kelompok jihadis merupakan kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaida. Pada awalnya kelompok ini membantu oposisi Suriah dalam melakukan pemberontakan terhadap rezim Assad, Kelompok jihadis ini juga mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya seperti; diberikan bantuan dana, diberikan peralatan senjata, dilatih cara berperang, dll. Namun dalam perkembangannya, mereka tidak lagi membantu para oposisi, tetapi memiliki agenda tersendiri untuk membentuk khilafah. Di antara kelompok jihadis tersebut adalah Jabha al-Nusrah, Ahrar al-Sham kataeb, Liwa' al-Tauhid, Ahrar Souria, Halab alShahba, al-Harakah al-Fajr al-Islamiah, Dar al-Ummah, Liwa Jaish Muhammad, Liwa' alNasr, Liwa' Dar al-Islam dan lain-lain;

Kelompok Jihadis menyatakan bertanggungjawab dalam sejumlah aksi bom bunuh diri yang ditargetkan terhadap pemerintah Suriah selama terjadinya perang sipil di negara tersebut. Pada Desember 2012, Amerika Serikat menyatakan kelompok jihad Jabhat alNusra sebagai kelompok teroris. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah keterlibatan kaum ekstremis dalam grup oposisi Suriah.

Akibat yang ditimbulkan oleh kemunculan gerakan kelompok ISIS maupun kelompok-kelompok teroris lainnya tersebut, tentu saja mendapat reaksi keras, bukan hanya dari pemerintah yang berkuasa di Irak dan Suriah untuk menumpas gerakan tersebut, tetapi juga dari pihak Amerika Serikat bersama negara-negara Barat lainnya yang merasa terancam menjadi korban bagi warga negaranya. Khusus bagi Amerika Serikat, sebagai negara “penguasa” di Irak dan memiliki kepentingan di Suriah, merasa perlu melakukan upaya preventif dan represif. Di mana upaya preventifnya adalah Amerika Serikat membentuk koalisi internasional, sedangkan upaya represifnya adalah Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap gerakan ISIS.

Keseriusan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS terbukti dengan membentuk koalisi dengan berbagai negara baik dengan sekutu-sekutunya di Timur Tengah maupun di luar Timur Tengah. Hal ini dilakukan mengingat kekuatan ISIS baik di Irak maupun di Suriah sangat besar dan memiliki tingkat militansi yang tinggi.¹¹

Koalisi Internasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat mendapat tanggapan positif dari dunia internasional. Dengan bergabungnya beberapa negara dalam koalisi tersebut diharapkan akan menghambat meluasnya gerakan ISIS. Anggota koalisi pun diharapkan dapat memberikan dukungan baik bantuan kemanusiaan ataupun bantuan kemiliteran.

¹¹ *Amerika Serikat Galang Kekuatan Melawan ISIS.*
<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/09/116605610/Amerika-Serikat-Galang-Kekuatan-Melawan-ISIS>. Diakses pada 15 Juli 2017, 11.43 WIB.

Kemudian, untuk upaya represifnya, Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap gerakan ISIS guna membasmi keberadaan mereka. Amerika Serikat bersama dengan pasukan koalisi berusaha menggempur ISIS habis-habisan, tidak tanggung-tanggung serangan militer yang dilancarkan melalui dua jalur sekaligus yakni jalur udara dan jalur darat. Kombinasi serangan udara militer Amerika Serikat dibantu dengan pergerakan darat dari militer Irak benar-benar efektif untuk menyudutkan dan melemahkan posisi ISIS di Irak, baik secara jumlah militan yang tewas maupun secara moral yang mengalami penurunan.¹²

Dalam beberapa kepemimpinan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Irak memang menjadi salah satu perhatian bagi politik luar negeri Amerika Serikat terutama mengenai isu terorisme dan di masa kepemimpinan Presiden Obama, GWOT masih menjadi salah satu PLN Amerika terhadap gerakan ISIS.

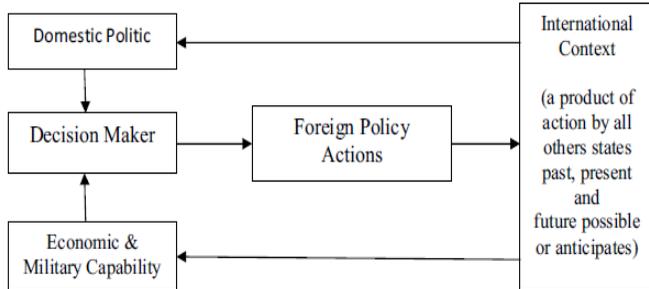
B. Rumusan Masalah

Mengapa Presiden Barack Obama membuat kebijakan memerangi gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (2009-2016)?

¹² Willy Haryono, 2016. *Serangan Koalisi AS terhadap ISIS di Irak Kian Mematikan*.
<http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/01/21/214312/serangan-koalisi-as-terhadap-isis-di-irak-kian-mematikan>.
Diakses pada 18 Juli 2017, 13.34 WIB.

C. Landasan Teoritik

1. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri (William D.Coplin)



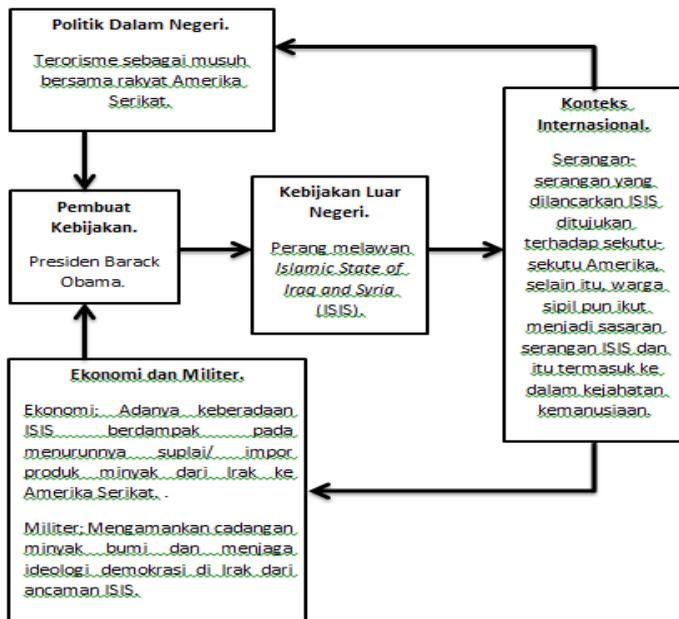
Gambar1.1

Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri (William D. Coplin)

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang kebijakan Presiden Barack Obama memerangi gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (2009-2016), penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul “*Introduction of International Politic*”. Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang memengaruhinya.

William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan

keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang memengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua adalah kapabilitas ekonomi dan militer, dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.¹³



Gambar 1.2
Aplikasi Teori Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri (William D. Coplin)

¹³ William D. Coplin dan Marsedes Marbut (Penterjemah). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke-2. 2003. 30

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk memengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasa Coplin disebut dengan "*policy influencer*". Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan.

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dll. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran, sehingga menguatkan legitimasinya.

Teori William D. Coplin tersebut diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem politik. Menurut Easton, "Kondisi Politik Dalam Negeri" merupakan gambaran mengenai "dukungan dan tuntutan" yang datang dari warga negara atau dalam

bahasa Easton disebut sebagai *input*.¹⁴ *Input* tersebut akan memengaruhi proses pembuatan kebijakan politik, baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga, para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan di lembaga politik.

Barack Obama merupakan Presiden Amerika Serikat ke-44 yang berasal dari Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri merupakan sebuah partai yang berpaham/ berideologi liberal. Ideologi partai Demokrat ini cukup berbeda dengan sang rival yakni partai Republik yang berpaham/ berideologi konservatif. Ideologi yang dianut oleh partai Demokrat cukup banyak memengaruhi visi berpolitik Presiden Obama, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Obama cukup kontras dan berbeda dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yaitu di era George W. Bush yang notabene berasal dari partai Republik. Meskipun memiliki pandangan maupun ideologi yang berbeda, namun untuk masalah keamanan nasional terutama ancaman terorisme, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat mempunyai kebijakan yang sama yaitu memerangi segala bentuk tindak kejahatan terorisme dan sama-sama berpandangan bahwa, terorisme merupakan musuh bersama rakyat Amerika Serikat.

Di era Presiden Bush, pembuat kebijakan didominasi oleh partai Republik yang cenderung konservatif, sehingga membuat kebijakan luar negeri

¹⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008. 77

Amerika Serikat terhadap Irak bersifat agresif dan fokus pada kekuatan militer. Semenjak peristiwa serangan 11 September 2001, banyak pihak yang mendukung kebijakan neo-konservatif partai Republik yang disebut *War on Terrorism*, termasuk invasi terhadap Irak pada tahun 2003. Kebijakan lain yang dirumuskan pada masa pemerintahan Bush adalah kebijakan perang di Afghanistan tahun 2001 dan membuka penjara yang diperuntukkan bagi para teroris di Teluk Guantanamo. Invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak juga termasuk sebagai kebijakan partai Republik yakni kebijakan *Pre-Emptive Strike*. Kebijakan ini dapat disebut sebagai kebijakan pertahanan, di mana Amerika Serikat dapat terlebih dahulu melakukan perang dan menghancurkan pertahanan militer musuh berdasarkan ekspektasi akan keadaan masa depan.¹⁵

Berlanjut ke presiden yang selanjutnya yakni Presiden Barack Obama. Visi Obama tetap menjalankan politik *war on terrorism*. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan Obama di Afghanistan yang memutuskan untuk menambah pasukan Amerika Serikat di negara itu dalam rangka memerangi Taliban dan Al Qaeda. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ia tak berbeda jauh dengan George W. Bush, yang menggunakan kekuatan militer untuk mengukuhkan hegemoni Amerika Serikat di Afghanistan. Kemudian, di periode kedua Obama menjabat sebagai presiden, kampanye *war on terrorism* masih terus berlanjut dan menjadi salah satu alat politik luar negeri Obama. Kelompok teroris

¹⁵ Ekspektasi masa depan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk terhindar dari serangan-serangan militer, seperti yang telah terjadi pada peristiwa serangan 11 September 2001. Sebagai contoh adalah penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003.

selanjutnya yang menjadi sasaran untuk diperangi adalah kelompok ISIS yang berbasis di Irak dan Suriah. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa dari partai manapun presidennya berasal, politik *war on terrorism* akan selalu menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat, hanya caranya saja yang berbeda di dalam merealisasikannya.

b. Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam memengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja.¹⁶ Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variabel ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan menguasai Eropa saat Perang Dunia. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Dalam era industri modern, jika ekonomi mampu memproduksi barang secara masal maka ia juga mempunyai kemampuan untuk menghancurkan masal melalui industri senjata yang semakin destruktif. Jika tanah dan emas menjadi tolak ukur di abad feodal, maka kemajuan industri menduduki posisi penting dalam era modern ini. Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka

¹⁶ William D. Coplin. 112

negara tertentu akan lebih aktif dalam “panggung” politik internasional. Bisa juga dikatakan bahwa, kemampuan ekonomi dan militer sebuah negara dapat memengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) di mata negara lain.

Kekuatan ekonomi dan militer merupakan dua unsur penting yang memengaruhi kapabilitas suatu negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka negara tersebut akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.¹⁷

Saat ini, Amerika Serikat merupakan negara dengan salah satu kekuatan perekonomian dan militer terbesar di dunia. Di sektor perekonomian, Amerika Serikat menjadi salah satu roda perekonomian terbesar di dunia berkat kemajuan industrinya. Oleh karena maju dan besarnya perindustrian di sana, tidak mengherankan apabila Amerika Serikat menjadi negara dengan konsumsi minyak bumi terbanyak di dunia. Minyak bumi menjadi komoditas paling penting dalam keberlangsungan perindustrian di sana, tercatat Amerika Serikat menghabiskan 19,2 juta barel per hari.¹⁸

¹⁷ Budi Winarno. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: Buku Seru, 2011.

¹⁸ Fitriana Monica Sari. 2016. *5 Negara Konsumen Minyak Terbesar di Dunia*. <http://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/5-negara-konsumen-minyak-terbesar-di-dunia/ar-BBxHPbt?li=AA59Az>. Diakses pada 16 Maret 2017, 16.12 WIB.

Tingginya tingkat konsumsi minyak membuat Amerika Serikat harus melakukan eksplorasi untuk bisa memenuhi kebutuhan suplai minyaknya dan kawasan Timur Tengah pun dilirik karena kawasan tersebut mempunyai cadangan minyak bumi yang besar. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Barack Obama terhadap Irak di bidang ekonomi salah satunya masih berfokus untuk mendapatkan tambahan suplai minyak bumi. Hal tersebut tidak lepas dari status Irak sebagai salah satu negara di Timur Tengah yang mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar. Diperkirakan kapasitas kandungan minyak Irak sebesar 112 miliar barel yang berarti menempati urutan kedua setelah Arab Saudi.¹⁹ Kualitas minyak bumi Irak pun juga terkenal sangat baik.

Kemudian, di bidang militer, Presiden Barack Obama membuat kebijakan untuk memerangi dan memberantas keberadaan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Kebijakan tersebut diambil karena ISIS dianggap sebagai kelompok teroris yang dapat mengancam kepentingan nasional Amerika baik di Irak, maupun di kawasan Timur Tengah. Maka dari itu, agar kepentingan nasionalnya dapat tetap terjaga, pemerintah Amerika Serikat menggunakan militer mereka sebagai alat untuk menjaga cadangan minyak bumi, baik sebagai penjamin keamanan pasokan maupun untuk mencegah jatuhnya ladang-ladang minyak ke tangan ISIS. Selain itu, militer juga berfungsi untuk menjaga ideologi demokrasi tetap terjaga di Irak karena demokrasi merupakan salah satu warisan berharga dari invasi militer tatkala menggulingkan rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Amerika Serikat jelas tidak ingin hasil invasi militer yang telah memerlukan banyak pengorbanan

¹⁹ Sidik Jatmika, hal. 18.

mulai dari tenaga, biaya, hingga nyawa manusia sirna dan tergantikan oleh cita-cita ISIS untuk mendirikan sebuah Negara Islam.

c. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya. Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkan sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif.²⁰ Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara mana yang kawan dan mana yang lawan. Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis.²¹

Pada mulanya, keberadaan ISIS tidak begitu dianggap sebagai sebuah ancaman yang berarti. ISIS masih dianggap sebagai gerakan Islam berpaham radikal kelas teri dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al Qaeda yang sudah dicap sebagai kelompok teroris oleh dunia internasional saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, eksistensi dan sepak terjang ISIS makin gencar dan agresif, sehingga membuat mereka menjadi sebuah ancaman bagi keamanan internasional. Hal yang membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang serta terus eksis adalah

²⁰ William D. Coplin. 166.

²¹ William D. Coplin. 167.

strategi yang mereka terapkan. Mereka menggunakan internet dan media sosial untuk menyebarkan propaganda mereka yang mengajak dan menyerukan kepada semua umat muslim di seluruh penjuru dunia untuk datang ke Irak dan Suriah demi mewujudkan cita-cita mendirikan Negara Islam.

Strategi yang digunakan oleh ISIS inilah yang membuat masyarakat internasional menjadi waspada, tak terkecuali negara-negara barat. Tak sedikit umat muslim yang berasal dari negara barat pada akhirnya memutuskan untuk terbang menuju Irak atau Suriah. Mereka terdorong untuk pergi karena di tempat mereka tinggal, mereka adalah kaum minoritas dan kebebasan beragama yang bisa mereka ekspresikan pun dibatasi oleh pemerintah setempat.

Namun, manuver ISIS yang membuat marah dunia internasional adalah ketika mereka merilis video eksekusi pemenggalan terhadap jurnalis-jurnalis asing, terutama jurnalis dari barat, via YouTube. Dalam video tersebut mereka juga mengancam akan memerangi siapapun yang berani menghalangi terwujudnya cita-cita mereka. Pasca perilis video tersebut, ISIS semakin berani untuk melancarkan terror secara langsung terhadap pihak-pihak yang berani melawan mereka. Di sinilah, Amerika Serikat melalui kebijakannya yakni *Global War on Terrorism* mulai melakukan langkah-langkah untuk melawan ISIS. Ancaman teror ISIS yang sudah bersifat global membuat Obama berinisiatif mengajak negara-negara lain bersama-sama memerangi ISIS dan membentuk pasukan koalisi anti-ISIS untuk menghancurkan kelompok tersebut sekaligus untuk menjaga perdamaian internasional.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah “Tujuan mendasar serta faktor paling penting yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan unsur vital bagi negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi”.²² Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan politik luar negeri.

Konsep kepentingan nasional merupakan hasil telaah para pemikir realisme. Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa, “Politik itu sendiri pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara, dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik aksi politik”.²³ Morgenthau yakin bahwa, setiap pemimpin negara wajib melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan pada kepentingan nasional dan pemimpin akan disalahkan apabila gagal mencapainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan politik domestik, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional diartikan sebagai kelangsungan hidup (*survive*) suatu negara yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik,

²² Jack C. Plano & Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional* (terjemahan). Wawan Juanda. Jakarta: Putra A. Bardin. 1999.

²³ Robert Jackson & Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. 100.

mempertahankan rezim ekonomi politiknya, dan memelihara identitas budayanya dalam dunia internasional.²⁴

Menurut Kenneth Waltz, seorang ilmuwan realis, mendasarkan kepentingan nasional terhadap tatanan politik internasional yang bersifat anarki yang tersebar di antara negara-negara.²⁵ Tidak ada negara manapun yang menjamin bahwa kehidupan suatu negara akan sejahtera dan damai. Sehingga, tidak ada juga yang menjamin bahwa suatu negara tidak akan melakukan tindakan tertentu untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, negara-negara berkekuatan besar dalam tatanan dunia internasional yang anarki, menurut Kenneth Waltz lebih memiliki kesempatan yang besar untuk memengaruhi kebijakan yang berlaku bagi semua negara. Akibatnya, negara-negara yang memiliki kekuatan kecil sering kali mendapat kerugian dari “ulah” negara yang memiliki kekuatan lebih besar.

Timur Tengah, dari segi letak geografis, kekayaan minyak dan religi; adalah kawasan yang paling strategis di dunia. Maka dari itu, pantaslah jika banyak kekuatan besar (*super power*) yang memerebutkan kawasan ini, salah satunya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri bisa dibilang adalah pemain lama di “panggung” Timur Tengah karena Amerika Serikat sudah memberikan perhatian cukup serius terhadap kawasan ini sejak tahun 1932-1934 seiring dengan ditemukannya sumber minyak di Bahrain, Saudi, dan Kuwait. Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya terhadap Timur Tengah, Amerika Serikat mempunyai kepentingan-kepentingan dasar yang dijadikan sebagai sebuah pedoman. Lantas, apa saja

²⁴ Kenneth Waltz Thompson & Hans J. Morgenthau. *Politik Antar Bangsa* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.

²⁵ Robert Jackson & Georg Sorensen. 115.

kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap Timur Tengah? Kepentingan-kepentingan dasar itu antara lain:²⁶

1. Menjaga eksistensi Israel sebagai “Saudara Tua” dan “Ujung Tombak” Amerika Serikat di Timur Tengah.
2. Menjaga eksistensi kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Timur Tengah (Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya).
3. Menjaga eksistensi para “penguasa sekutu Amerika Serikat” di Timur Tengah (misalnya: Saud, Al Sabah, Hamid Karzai, Jalal Talabani); atau “oposisi” (kaum separatis Darfur, kelompok Kurdi di era Saddam, dan sebagainya).
4. Menjaga eksistensi eksplorasi dan transportasi minyak ke negara-negara sekutu Amerika Serikat (Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya).

D. Hipotesa

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Barack Obama terhadap gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (2009-2016) dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Kondisi politik dalam negeri; Adanya persamaan pandangan baik Partai Demokrat maupun Partai Republik terhadap tindak kejahatan terorisme bahwa terorisme itu harus diperangi dan merupakan musuh bersama rakyat Amerika Serikat.
2. Kapabilitas ekonomi dan militer; Adanya keberadaan ISIS di Irak ternyata berdampak pada menurunnya suplai/ impor produk minyak dari Irak. Kemudian

²⁶ Sidik Jatmika. 137.

untuk militer, Kekuatan militer Amerika Serikat banyak dipakai sebagai alat untuk mengamankan ladang-ladang minyak dan rute-rute pasokannya. Selain itu, juga untuk menjaga ideologi demokrasi di Irak dari cita-cita ISIS mendirikan Negara Islam.

3. Konteks Internasional; Serangan-serangan/ teror-teror yang dilancarkan ISIS tidak hanya ditujukan kepada Amerika Serikat saja, melainkan telah mengarah terhadap sekutu-sekutu Amerika Serikat. Selain itu, warga sipil pun ikut menjadi sasaran serangan ISIS dan itu termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Barack Obama terhadap Irak dalam hal perang terhadap terorisme, terutama terhadap keberadaan ISIS di Irak.
2. Untuk mengetahui kepentingan-kepentingan nasional Amerika Serikat di balik kebijakan memerangi kelompok teroris ISIS di Irak periode kepemimpinan Presiden Barack Obama (2009-2016).

F. Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahannya tidak terjadi penyimpangan. Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan, bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji tentang politik luar

negeri Presiden Amerika Serikat Barack Obama terhadap gerakan ISIS periode 2009-2016.

Irak menjadi salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah yang mendapatkan perhatian cukup besar dari Amerika Serikat karena Irak dipandang sebagai negara yang mempunyai potensi untuk membantu Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Secara sumber daya alam, bisa dikatakan Irak merupakan negara yang kaya dikarenakan Irak mempunyai cadangan minyak bumi yang besar. Namun, keberadaan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Irak memunculkan masalah baru bagi Amerika Serikat karena keberadaan ISIS berpotensi mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat di Irak khususnya, dan Timur Tengah pada umumnya. Lalu, tahun 2009 hingga tahun 2016 dipilih sebagai batasan waktu karena pada periode tersebutlah Barack Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44.

G. Metode Penelitian

Penulis memilih metode penelitian kualitatif. Detil yang dijelaskan dalam skripsi ini melalui data sekunder yaitu studi literatur, yang diutamakan data tertulis bentuk cetak seperti buku, jurnal, majalah, koran, diktat kuliah, dll. Serta juga berusaha dilengkapi dengan data tertulis berbentuk elektronik seperti e-book dan website yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar, dan internet.

H. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna mempermudah penyusunan bahasan dan uraian-uraian. Sistematika penulisan dalam karya tulis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I yakni bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan tentang dinamika politik Amerika Serikat dan politik luar negerinya terhadap kawasan Timur Tengah dan Irak, serta kebijakan Amerika Serikat terhadap ISIS.

Bab III penulis akan membahas tentang dinamika perkembangan gerakan ISIS yang meliputi apa, kapan, di mana, siapa pendiri/ pemimpinnya, mengapa dan bagaimana kelompok/ organisasi ini bisa terbentuk hingga proses di mana ISIS menjelma menjadi kelompok teroris yang ditakuti di dunia.

Bab IV akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan Presiden Barack Obama memerangi gerakan ISIS di Irak dan kepentingan-kepentingan nasional Amerika Serikat di balik kebijakan tersebut.

Bab V yakni penutup/ kesimpulan, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.